

Dr. Jusuf Harsono, M.Si
Dr. Insyira Yusdiawan Azhar, M. Sos
Sherly Dyah Ikawati | Ervina Triyas Safitri
Nanda Feliana | Fery Samudra Fika



TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA: SEJARAH, STRUKTUR, KOLABORASI DAN TANTANGAN



**TATA KELOLA
PENYELENGGARAAN PEMILU
DI INDONESIA:
SEJARAH, STRUKTUR, KOLABORASI
DAN TANTANGAN**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TATA KELOLA

PENYELENGGARAAN PEMILU

DI INDONESIA:

SEJARAH, STRUKTUR, KOLABORASI

DAN TANTANGAN

Dr. Jusuf Harsono, M.Si.

Dr. Insyira Yusdiawan Azhar, M. Sos.

Sherly Dyah Ikawati

Ervina Triyas Safitri

Nanda Feliana

Fery Samudra Fika



Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA: SEJARAH, STRUKTUR, KOLABORASI DAN TANTANGAN

Penulis : Dr. Jusuf Harsono, M.Si., Dr. Insyira Yusdiawan Azhar, M. Sos., Sherly Dyah Ikawati, Ervina Triyas Safitri, Nanda Feliana, [dan 1 lainnya]

Desain Cover : Dian Novriadi

Sumber : www.shutterstock.com

Tata Letak : Tata

Proofreader : M. Royfan A.

Ukuran:

xii, 106 hlm., Uk.: 15.5x23 cm

ISBN:

978-634-01-0646-6

Cetakan Pertama:

Mei 2025

Hak Cipta 2025 pada Penulis

Copyright © 2025 by Deepublish Publisher

All Right Reserved

PENERBIT DEEPUBLISH

(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IAKPI (076/DIV/2012)

Jl. Rajawali, Gg. Elang 6, No. 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl. Kaliurang Km. 9,3 – Yogyakarta 55581

Telp./Faks : (0274) 4533427

Website : www.penerbitdeepublish.com

www.deepublishstore.com

E-mail : cs@deepublish.co.id

Hak cipta dilindungi undang-undang.

*Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.*

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Diskursus mengenai pemilihan umum menjadi bahan diskusi yang menarik bagi para penstudi ilmu politik dan ilmu pemerintahan karena banyak dimensi yang dapat ditinjau baik dari sisi peserta Pemilu, partisipasi publik/opini publik, hingga pada tata kelola organisasi penyelenggara Pemilu. Menarik karena tidak hanya elemen akademisi maupun praktisi yang melakukan perdebatan dalam Penyelenggaraan Pemilu, namun masyarakat hingga kalangan bawah mendiskusikan tema Pemilu meskipun dalam konteks yang sederhana. Namun tema ini tetap menjadi diskusi politik yang menarik karena konteks kajian yang luas bahkan dapat dikaji dari berbagai sisi keilmuan.

Dalam pemahaman yang sederhana, Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki kredibilitas tinggi berpengaruh pada proses dan hasil yang berdampak pada berbagai proses kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Apabila ditinjau secara detail, setiap tahapan proses pemungutan suara sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial dan politik. Bisa dibayangkan apabila penyelenggara Pemilu tidak menjunjung tinggi asas keadilan, egalitarianisme, dan transparansi, proses pemungutan dan penghitungan suara akan berdampak pada lemahnya *public trust*. Efeknya adalah partisipasi publik terhadap Penyelenggaraan Pemilu akan menurun, manipulasi data, korupsi, hingga proses politik yang tidak berjalan.

Indonesia memiliki titik terendah dalam kredibilitas Penyelenggaraan Pemilu di era kepemimpinan Presiden Soeharto. ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) menggunakan instrumen melakukan teror ke masyarakat supaya berpartisipasi politik mendukung partai Golkar yang dipimpin oleh Soeharto. Tidak hanya itu, pengerahan massa melalui Aparatur Sipil Negara (ASN)

dituntut hingga memengaruhi keluarga dan lingkungan. Meskipun terdapat partai lain selain Golkar, namun penggiringan partisipasi politik publik cenderung tidak berdasarkan asas yang demokratis. Dampaknya rezim militer dapat berkuasa hingga 32 tahun. Selama itu pula masyarakat tidak memiliki kebebasan yang diinginkan.

Pasca reformasi, perubahan yang terjadi secara total tidak hanya di sektor politik, namun juga tata kelola pemerintahan termasuk dalam hal Penyelenggaraan Pemilu. Meskipun era reformasi sudah berlangsung selama 6 periode Pemilu, namun Indonesia masih memiliki perubahan pada sejumlah aturan. Pada awalnya, pemilihan presiden dilaksanakan oleh MPR. Namun sejak tahun 2004, pemilihan presiden maupun lembaga eksekutif lainnya dipilih masyarakat secara langsung dan partai politik yang berpartisipasi semakin banyak. Reformasi inilah yang menandai perubahan pada sistem sekaligus memperbaiki kredibilitas Penyelenggaraan Pemilu.

Model pemilihan secara langsung menjadi bentuk yang diadopsi saat ini. Namun banyak penstudi mengkaji lagi terkait biaya Penyelenggaraan Pemilu yang dinilai sangat mahal. Mahfud MD berpendapat bahwa lebih baik sistem yang diterapkan adalah pemilihan eksekutif melalui legislatif dengan mencontoh pemilihan pada sistem parlementer. Namun konsekuensi itu akan mengubah struktur politik dan pemerintahan negara. Sehingga mempelajari penyelenggara pemilihan umum sangat menarik dikaji karena dinamika yang berkembang.

Buku ajar ini bertujuan untuk tidak hanya memahami pemilihan umum, tetapi juga mempelajari instansi yang menyelenggarakan Pemilu. Buku ini sengaja memfokuskan pada satu instansi yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tujuan mampu memahami secara mendalam peran, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan Pemilu.

Buku ini pada bagian awal bab akan menjelaskan secara konseptual sebagai dasar Penyelenggaraan Pemilu. Kemudian pada bab selanjutnya berfokus pada sejarah pemilihan umum di Indonesia

pada setiap era, struktur hierarki organisasi, hingga kerja sama yang dilakukan KPU. Pada bagian empat sengaja difokuskan pada KPU di level daerah karena sebagai eksekutor di lapangan, instansi ini memiliki sejumlah kerja sama atau mitra yang tidak banyak diketahui oleh publik. Sehingga buku ini sekaligus memberikan edukasi untuk masyarakat mengenal lebih jauh.

Selain itu pada bagian bab terakhir mengulas berbagai permasalahan yang dihadapi penyelenggara. Bahasan ini sengaja digali pada berita-berita dengan tujuan menambah wawasan secara praktis apabila mahasiswa suatu saat nanti bergelut pada dunia kerja di instansi ini. Sehingga diharapkan mahasiswa memiliki bekal yang cukup ketika lulus dari materi pada salah satu mata kuliah yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pemilu.

Ponorogo, 30 Maret 2025

Dr. Jusuf Harsono, M.Si.
Penulis

KATA PENGANTAR PENERBIT

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku **TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA: SEJARAH, STRUKTUR, KOLABORASI DAN TANTANGAN** dapat terwujud dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagai penerbit yang berkomitmen untuk mencerdaskan, membahagiakan, dan memuliakan umat manusia, kami merasa terhormat dapat berkontribusi dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan pendidikan melalui penerbitan karya ini.

Model pemilihan langsung yang berlaku saat ini menuai kajian terkait biaya penyelenggaraan yang tinggi. Wacana pemilihan eksekutif melalui legislatif ala sistem parlementer muncul, namun berpotensi mengubah struktur politik dan pemerintahan. Dinamika penyelenggara Pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi fokus menarik untuk dipelajari. Buku ajar ini bertujuan memahami Pemilu dan secara mendalam peran, tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab KPU. Pembahasan awal mencakup konsep dasar Pemilu, diikuti sejarah Pemilu di setiap era, struktur organisasi KPU, kerja sama di berbagai tingkatan, hingga fokus pada KPU daerah sebagai pelaksana di lapangan dan mitra kerjanya yang sering kali kurang dikenal publik, dengan tujuan memberikan edukasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada penulis, yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Kami berharap karya ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan keilmuan di Indonesia. Semoga buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi yang berharga, tetapi juga menginspirasi pembacanya untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
KATA PENGANTAR PENERBIT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PEMILU INDONESIA: ANTARA PRINSIP DEMOKRASI DAN REALITA	
PENYELENGGARAAN	1
A. <i>Free and Fair Election</i>	9
B. Permasalahan Penyelenggara Pemilu	11
BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.....	16
A. Era Orde Lama (Pemilu 1955).....	17
B. Era Orde Baru (Pemilu 1971-1977).....	23
C. Era Reformasi (Pemilu 1999-2024).....	30
D. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia	34
E. Perubahan Aturan Setiap Pemilu	36
BAB III STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM.....	38
A. Pembagian Kewenangan dari Pusat ke Daerah.....	39
B. Peran, Tugas, dan Fungsi Masing-Masing Komisioner	43
C. Penjelasan Masing-Masing Aktor Politik (PPK, PPS, KPPS, Pantarlih).....	50

BAB IV	STRATEGI KOLABORATIF KOMISI PEMILIHAN UMUM	56
A.	Kemitraan dan Kerja Sama KPU dengan Berbagai <i>Stakeholder</i>	59
B.	Kemitraan dan Kerja Sama dengan Media dan Pers	63
C.	Kemitraan dan Kerja Sama di Sektor Pendidikan dan Pemilih Pemula	67
D.	Pemungutan Suara di Lokasi Khusus dan Kerja Sama dengan Lembaga Terkait	71
E.	Kerja Sama KPU dengan Organisasi Masyarakat	75
BAB V	PEMILU DI ERA DINAMIS: TANTANGAN PENYELENGGARAAN PEMILU MASA KINI.....	78
A.	Pemilihan Petugas Lapangan	81
B.	Distribusi Logistik.....	88
C.	Distribusi dan Tata Kelola Keuangan	91
D.	Penentuan TPS	94
DAFTAR PUSTAKA		98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Model Desain Pemilihan Umum	4
Gambar 1.2	Pola Penyelenggaraan Pemilihan Umum Secara Umum di Berbagai Negara.....	7
Gambar 3.1	Bagan Komisioner KPU RI.....	44
Gambar 3.2	Bagan Komisioner KPU Provinsi.....	46
Gambar 3.3	Bagan Komisioner KPU Kabupaten.....	48
Gambar 3.4	Sosialisasi KPU kepada Pemilih Pemula	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Terkait dengan Sebelum, pada Hari Pelaksanaan, dan Setelah Pelaksanaan Pemilu	10
Tabel 1.2	Peningkatan Jumlah Pemilih	12
Tabel 2.1	Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR.....	21
Tabel 2.2	Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante	22
Tabel 2.3	Kelebihan dan Kelemahan Sistem Distrik.....	35
Tabel 2.4	Kelebihan dan Kelemahan Sistem Proporsional	36
Tabel 3.1	Pembagian Tugas dan Kewenangan antar KPU pusat, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.....	40
Tabel 3.2	Contoh Tahapan dan Jadwal Seleksi Terbuka Pembentukan PPS dalam Pilkada Tahun 2024.....	52